



Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri (The Political Culture of the Community in Slogohimo District Wonogiri Regency)

Windarsih¹, Novia Wahyu Wardhani²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Informasi

Artikel

Keyword: *Political Culture, Political Orientation, Slogohimo District Community*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 dibanding Pemilu 2024 di Kecamatan Slogohimo. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, berita, dan laporan resmi penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat Kecamatan Slogohimo cenderung ke arah tipe campuran parokial-kaula. Sebagian masyarakat memiliki pengetahuan politik yang rendah dan tingkat partisipasi politik yang minim, terutama dalam aspek input. Sementara itu, sebagian lainnya menunjukkan kesadaran dan minat terhadap sistem politik, yang tampak melalui orientasi afektif seperti rasa bangga, dukungan, atau ketidakpercayaan terhadap sistem, khususnya pada output pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya sikap pasif, di mana masyarakat merasa tidak mampu memengaruhi kebijakan dan cenderung menerima keputusan pemerintah tanpa banyak perlawanan. Faktor pendorong budaya politik antara lain perkembangan teknologi, akses informasi, solidaritas sosial, dan tingkat pendidikan. Adapun faktor penghambat meliputi loyalitas politik tradisional yang kaku, rendahnya partisipasi politik, dan apatisme generasi muda. Pemerintah Kecamatan Slogohimo perlu menjalin kolaborasi aktif dengan masyarakat guna meningkatkan pendidikan dan sosialisasi politik demi mendorong budaya politik yang lebih partisipatif.

Kata kunci: *Budaya Politik, Orientasi Politik, Masyarakat Kecamatan Slogohimo*

ABSTRACT

This research is motivated by the decline in public participation in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) compared to the 2024 General Election (Pemilu) in Slogohimo District. Using a literature review and a descriptive qualitative approach, data were drawn from journals, books, academic articles, news, and official election reports. The findings reveal that the community's political culture largely reflects a mixed parochial-subject type. Many citizens possess limited political knowledge and low participation, particularly in decision-making inputs, while others display awareness and affective orientations such as pride, support, or distrust toward government outputs. This indicates a generally passive attitude, as citizens feel unable to influence policies and tend to accept governmental decisions with minimal resistance. Factors encouraging political culture include technological development, access to information, social solidarity, and education, whereas hindering factors involve rigid traditional loyalties, low participation, and youth apathy. Strengthening collaboration between local government and the community is essential to enhance political education and foster a more participatory political culture.

Key words: *Political Culture, Political Orientation, Slogohimo District Community*

Pendahuluan

Budaya politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan politik suatu masyarakat karena mencerminkan orientasi dan sikap warga negara terhadap sistem politik serta peran mereka di dalamnya. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, keberagaman budaya politik memengaruhi kualitas partisipasi politik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara mengukur kualitas demokrasi masyarakat. Menurut Wilda Rasaili, kualitas demokrasi harus didasari budaya politik yang terbangun sebelum Pilkada, saat Pilkada berlangsung, dan setelah Pilkada (Rasaili, 2016). Budaya politik jauh lebih kompleks dari sebatas pesta demokrasi setiap lima tahun sekali.

Menurut Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) 2024 yang diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum, secara nasional tingkat partisipasi Pemilu Presiden 81,48 persen, Pemilu Legislatif 81,14 persen, dan Pemilu DPD 81,50 persen (Komisi Pemilihan Umum, 2025). Sedangkan rata-rata partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 secara nasional mencapai 68 persen (Gabriela, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan partisipasi masyarakat secara signifikan dari Pemilu ke Pilkada 2024.

Tren penurunan juga terjadi di tingkat daerah. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Wonogiri mencapai angka 77,14 persen (Luhung, 2024). Sedangkan pada Pilkada Wonogiri 2024 dan Pilkada Jawa Tengah 2024, tingkat partisipasi pemilih masing-masing hanya 69,95 persen dan 69,98 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 842.326 orang (Asegaf, 2024).

Sedangkan berdasarkan data Panitia Pemilihan Kecamatan Slogohimo, partisipasi masyarakat di Kecamatan Slogohimo pada Pemilu 2024 yaitu sekitar 73,39 persen.

Sedangkan pada Pilkada 2024 yaitu 67,12 persen pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan 67,10 persen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat mengalami penurunan dari Pemilu 2024 menuju Pilkada 2024 di tingkat nasional, di Kabupaten Wonogiri, maupun Kecamatan Slogohimo.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum adalah budaya politik. Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, dan adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya (Kantaprawira, 2006). Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya (Sumartono, 2018). Oleh karena itu, budaya politik memengaruhi keputusan anggota masyarakat untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam sistem politik.

Miriam Budiardjo dalam (Abdulkarim & Ratmaningsih, 2012) mengungkapkan bahwa budaya politik dapat berubah seiring waktu, terutama dalam respons terhadap peristiwa atau transformasi politik yang signifikan. Perubahan dalam budaya politik dapat mencakup pergeseran nilai-nilai politik, pendekatan terhadap pemerintah, atau bahkan perubahan dalam cara masyarakat mengartikan dan merespons isu-isu politik.

Menurut (Yusuf, 2015), adanya dinamika dalam budaya politik akan memberikan suatu gambaran mengenai sikap

orientasi masyarakat terhadap setiap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tataran masyarakat lokal. Pemikiran, perasaan, dan sikap manusia dihasilkan melalui pembentukan budaya politik lokal pada masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar dalam setiap tindakan politik masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri memiliki karakteristik sosial budaya yang khas. Masyarakat umumnya masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan memiliki ikatan komunitas yang kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Egeten, 2015), bahwa budaya politik masyarakat saling berintegrasi dengan dijiwai semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Kondisi ini memengaruhi perilaku dan orientasi politik masyarakat, baik dalam konteks pemilihan umum, keterlibatan dalam forum musyawarah, maupun persepsi terhadap institusi politik formal.

Hal ini menjadikan Kecamatan Slogohimo sebagai studi kasus yang menarik untuk meneliti bagaimana budaya lokal membentuk sikap dan perilaku politik masyarakat, termasuk dalam hal kepercayaan kepada pemerintah, keterlibatan dalam pemilu, hingga kecenderungan politik yang berkembang.

Penelitian ini juga penting dalam konteks pembangunan politik yang inklusif. Pemahaman terhadap budaya politik lokal mendorong para pembuat kebijakan, aktor politik, dan masyarakat sipil dapat merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik dan kualitas demokrasi di daerah. Selain itu, kajian ini dapat memperkaya khazanah ilmu politik lokal yang selama ini masih banyak terfokus pada wilayah perkotaan atau pusat-pusat kekuasaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis secara konseptual karakteristik budaya politik masyarakat Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, yang dapat dikaji melalui sumber tertulis dan dokumen resmi. Data diperoleh dari sumber sekunder yang relevan, antara lain: jurnal ilmiah yang membahas budaya politik, buku dan artikel akademik terkait teori budaya politik, berita dan laporan resmi dari penyelenggara pemilu, serta hasil penelitian terdahulu.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dengan cara mengidentifikasi literatur yang relevan, menyeleksi sumber berdasarkan kredibilitas dan keterkaitannya dengan variabel penelitian, serta mengumpulkan informasi yang berisi data tentang karakteristik budaya politik masyarakat Kecamatan Slogohimo dan faktor-faktor yang memengaruhi budaya politik masyarakat Kecamatan Slogohimo. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengompilasi informasi dari berbagai sumber, mengategorikannya sesuai tema, melakukan analisis tematik untuk memahami keterkaitan antara temuan, serta menyintesis hasil analisis menjadi narasi yang menjawab rumusan masalah. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, membandingkan informasi dari berbagai literatur, menggunakan sumber resmi, dan publikasi ilmiah bereputasi, serta mencatat kutipan sesuai kaidah akademik untuk menghindari plagiarisme. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis, terperinci, dan berbasis bukti mengenai karakteristik dan faktor-faktor yang memengaruhi budaya politik masyarakat Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu buddhaya, buddhaya merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti akal atau budi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kebudayaan berarti semua hal yang bersangkutan dengan akal (Pureklolon, 2021). Pengertian budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.

Pengertian politik menurut Miriam Budiardjo adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the good of life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu (Budiardjo, 2008).

Sedangkan pengertian politik menurut Budi Setiyono, yaitu segala hal yang menyangkut berbagai macam perbedaan pendapat, pertentangan, atau kepentingan yang bersaing satu sama lain antara individu, kelompok kepentingan, partai, negara, atau aktor-aktor lain. Politik memiliki kecenderungan umum di mana tiap aktor biasanya memiliki kehendak untuk menyelesaikan berbagai perbedaan itu melalui mekanisme yang disepakati (Setiyono, 2019).

Menurut Miriam Budiardjo dalam (Pureklolon, 2021), budaya politik merupakan keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat

yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri (Saleh & Munif, 2015). Budaya politik dipengaruhi oleh sikap dan lingkungan. Oleh karena itu, terkadang kita menemukan budaya politik setiap wilayah berbeda-beda (Suryana, 2020).

Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam (Wangi, 2023) mengklasifikasikan budaya politik dalam bentuk orientasi politik. Dalam pendekatan perilaku politik, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap, dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi politik tersebut kemudian membentuk tatanan di mana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya memengaruhi budaya politik seseorang. Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang objek-objek politik.

Almond dan Verba dalam (Kartiwa, 2013) mengemukakan bahwa budaya politik suatu masyarakat dihayati melalui kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan, perasaan, dan evaluasi masyarakat tersebut yang berorientasi pada:

- a. Orientasi kognitif, merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- b. Orientasi afektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para pelaksana dan penampilannya. Perasaan masyarakat tersebut bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat.
- c. Orientasi evaluatif, merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek politik yang secara

tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki.

Selain itu, Almond dan Verba dalam (Wangi, 2023) membagi budaya politik dalam tiga jenis, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek, dan budaya politik partisipan. Penjelasan tiga jenis budaya politik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang bisa ditemukan dalam masyarakat-masyarakat yang belum berkembang di mana spesialisasi politik sangat minimal. Budaya politik parokial merujuk pada masyarakat yang cenderung apatis atau kurang tertarik dalam urusan politik. Istilah “parokial” dalam konteks ini mengacu pada pandangan sempit atau lokal yang dapat menghasilkan ketidakpedulian terhadap politik nasional atau global. Faktor-faktor seperti pendidikan, perubahan ekonomi, atau peristiwa politik dapat memengaruhi apakah budaya politik akan menjadi budaya politik yang lebih partisipatif dan peduli terhadap politik nasional atau global.

b. Budaya Politik Kaula/Subjek

Budaya politik kaula atau subjek memiliki frekuensi orientasi yang

tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (*input*) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Budaya politik subjek mengacu pada masyarakat yang cenderung pasif, apatis, atau kurang tertarik dalam urusan politik. Individu dalam budaya politik subjek cenderung memiliki sikap yang kurang kritis terhadap pemerintah, tidak aktif dalam berpartisipasi dalam proses politik, dan menerima otoritas pemerintah tanpa banyak pertimbangan.

c. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah suatu budaya politik di mana warga masyarakat memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik, dan administratif. Dengan kata lain, perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipan, masyarakat dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap tanggung jawabnya.

Berdasarkan teori budaya politik yang dikemukakan Gabriel Almond dan Sidney Verba, budaya politik masyarakat Kecamatan Slogohimo dapat dianalisis melalui orientasi afektif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif.

Orientasi kognitif masyarakat Kecamatan Slogohimo dapat dilihat melalui pengetahuan, informasi, dan pemahaman individu tentang sistem politik saat ini. Sebagian besar masyarakat generasi tua mengetahui tentang siapa pemimpin yang menjabat saat ini, siapa calon kepala daerah yang mencalonkan diri, dan partai-partai politik besar yang ada di Indonesia. Namun, banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait tugas dan wewenang lembaga negara serta proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Mereka hanya mengetahui sebatas nama-nama populer yang sering dibicarakan dalam diskusi sehari-hari. Umumnya mereka bertukar informasi melalui diskusi dalam pertemuan RT, PKK, arisan, pengajian, dan rapat karang taruna.

Sedangkan orientasi kognitif pada generasi muda masyarakat Kecamatan Slogohimo cenderung lebih baik. Mereka mengetahui tugas dan wewenang lembaga negara serta proses pembuatan kebijakan dan implementasinya. Pengetahuan dan pemahaman tersebut mereka dapatkan melalui media digital dan kurikulum pendidikan, seperti tren dalam media sosial dan berita daring serta materi pada jenjang pendidikan formal.

Orientasi afektif generasi tua masyarakat Kecamatan Slogohimo cenderung merasa bangga terhadap institusi politik seperti partai politik. Terdapat rasa hormat terhadap kepada partai politik yang telah lama berakar kuat di wilayah Kecamatan Slogohimo. Perasaan loyalitas ini menyebabkan mereka merasa kandidat lain dari luar partai tidak lebih baik daripada kandidat dari partai yang mereka banggakan.

Loyalitas ini tidak hanya bersumber dari sejarah panjang partai di daerah tersebut tetapi juga diperkuat oleh faktor-faktor sosial, seperti hubungan personal dengan tokoh partai dan persepsi keberpihakan partai terhadap kepentingan lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mustanir & Jaya, 2016)

yang menyatakan bahwa kekuatan politik yang telah dibangun sejak lama mengakibatkan masyarakat sulit menerima pengaruh dari luar kelompoknya.

Selain preferensi terhadap partai, asal-usul calon juga menjadi pertimbangan penting bagi pemilih. Putra daerah lebih dipandang memiliki potensi dalam membawa kemajuan bagi masyarakat karena dianggap memahami kebutuhan lokal secara lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Erviyanto, 2017), bahwa faktor figur menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya yaitu dilihat dari asal tempat tinggal atau domisili. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor kedekatan emosional dan identitas kedaerahan turut memperkuat sikap dan keputusan politik warga masyarakat.

Sedangkan orientasi afektif generasi muda masyarakat Kecamatan Slogohimo menunjukkan bahwa mereka memiliki perasaan negatif seperti ketidakpuasan dan kecewa terhadap sistem politik. Generasi muda memiliki emosi kekecewaan terhadap isu-isu politik tertentu, seperti: korupsi oleh aktor politik, kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodasi kepentingan publik, ketidakadilan dalam penegakan hukum, kesejahteraan sosial yang tidak merata, dan isu negatif lain. Namun, di sisi lain terdapat generasi muda yang apatis terhadap isu-isu politik..

Mereka merasa muak karena banjir informasi, yaitu menerima terlalu banyak informasi negatif dalam waktu bersamaan terkait isu politik. Hal ini menyebabkan mereka bersikap menghindari pembicaraan seputar politik ketika berkumpul di lingkungan pergaulannya. Hal ini membentuk sikap sinis dan tidak peduli generasi muda terhadap politik.

Generasi muda memiliki pengaruh yang besar dalam penyelenggaraan sistem politik. Selain dari jumlah mereka yang

banyak, generasi muda juga hidup di era segala informasi dapat diakses menggunakan internet atau media membangun kehidupan politik yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan politik sejak dini. Menurut Sanusi & Darmawan, pendidikan politik memiliki peran penting sebagai alat distribusi nilai kebangsaan bagi generasi muda yang memiliki posisi sangat vital dalam kehidupan kebangsaan sehingga pendidikan politik sangat perlu untuk diselenggarakan (Sanusi & Darmawan, 2016).

Pendidikan politik di Kecamatan Slogohimo perlu ditingkatkan, tidak hanya untuk generasi muda namun juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan strategi yang tepat dan sesuai dengan budaya masyarakat Kecamatan Slogohimo. Pendidikan politik bukan hanya sekadar pemberian materi atau indoktrinasi secara formal di ruangan-ruangan, namun juga mengikutsertakan masyarakat ke dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan berpolitik (Saputro, 2016). Salah satu contohnya adalah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sebab sering kali pendapat orang yang dikenal lebih dipercayai oleh masyarakat dibanding orang yang tidak mereka kenal. Selain itu, cara penyampaian tokoh masyarakat maupun tokoh agama dirasa mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat (Prayogo & Wardhani, 2022).

Orientasi evaluatif masyarakat Kecamatan Slogohimo menunjukkan bahwa keputusan politik di kalangan generasi tua sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan perasaan loyalitas terhadap partai politik yang telah berakar lama dalam masyarakat. Keputusan pilihan politik pada saat pemilihan umum dipertimbangkan berdasarkan partai pengusung calon anggota legislatif atau eksekutif. Sedangkan dalam hal menyampaikan pendapat, umumnya mereka hanya membicarakannya dalam

lingkup diskusi antar sesamanya tanpa menyuarakannya kepada pemangku kebijakan. Hal ini dikarenakan adanya pengalaman masa lalu ketika aspirasi masyarakat tidak kunjung direalisasikan atau membutuhkan waktu yang lama untuk ditindaklanjuti. Hal ini sekaligus menunjukkan orientasi afektif berupa ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang dan sikap apatis dalam penyampaian aspirasi publik.

Generasi muda menunjukkan orientasi evaluatif yang lebih beragam. Sebagian generasi muda yang memiliki pengetahuan dan informasi terkait sistem politik memutuskan untuk golput dalam pemilihan umum karena merasa tidak ada kandidat yang dapat mewakili harapan politiknya. Sedangkan sebagian yang lain memutuskan berpartisipasi dalam pemilu namun hanya sebatas formalitas menggunakan hak pilih sebagai warga negara yang baik. Hal tersebut mempertegas orientasi afektif mereka cenderung merasa dan bersikap tidak mempercayai integritas pemerintah dan partai politik.

Berdasarkan data di atas, budaya politik masyarakat Kecamatan Slogohimo cenderung ke arah tipe budaya politik campuran parokial-kaula. Hal ini dibuktikan adanya sebagian masyarakat yang memiliki orientasi kognitif atau pengetahuannya terhadap sistem politik rendah dan partisipasinya rendah dalam hal *input*. Sedangkan sebagian masyarakat yang lain memiliki minat perhatian atau kesadaran terhadap sistem politik. Orientasi afektif mereka yang nyata berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap tidak percaya terhadap sistem, terutama *output*-nya menunjukkan bahwa posisi sebagian masyarakat adalah pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya memengaruhi atau mengubah sistem sehingga cenderung menerima kebijakan

pemerintah tanpa banyak usaha memengaruhinya.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Slogohimo

Faktor-faktor yang mendorong terbentuknya budaya politik yang lebih partisipatif, yaitu:

- a. Perkembangan teknologi dan akses media informasi. Kemajuan teknologi informasi, terutama media sosial dan platform digital lainnya, telah memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk mengakses informasi politik secara lebih cepat dan luas. Generasi muda di Kecamatan Slogohimo menjadi kelompok yang paling aktif dalam memanfaatkan media sosial untuk memperoleh informasi politik, baik dalam bentuk berita, kampanye digital, maupun opini publik. Hal ini mendorong tumbuhnya kesadaran politik individu dan membuka ruang diskusi yang sebelumnya terbatas pada lingkungan keluarga atau komunitas tertentu. Adanya media digital mendorong orientasi politik masyarakat tidak lagi hanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial lokal melainkan juga oleh dinamika politik nasional dan global.
- b. Adanya semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang masih kuat. Hal ini tercermin dari kebiasaan masyarakat yang berangkat ke TPS secara bersama-sama, saling mengajak, dan menunjukkan kebersamaan dalam menjalankan hak politik. Aktivitas ini tidak hanya sekadar mencoblos tetapi juga menjadi ajang interaksi sosial dan solidaritas komunal. Sikap kolektif seperti ini mendorong masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh terhadap pemilu, sekalipun belum

semua memahami proses politik secara mendalam. Kebiasaan masyarakat dalam berdiskusi ketika berkumpul pada kegiatan seperti kerja bakti, arisan RT, dan perkumpulan sehari-hari menjadi wadah interaksi sosial bagi masyarakat. Sosialisasi politik melalui kegiatan seperti ini cenderung lebih efektif dibandingkan sosialisasi secara formal melalui forum resmi. Hal ini menjadi peluang bagi penyelenggara pemilu dalam menyusun strategi sosialisasi politik guna mendorong budaya politik yang lebih partisipatif.

- c. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya semakin besar kemampuannya untuk memahami sistem politik, menilai kebijakan publik secara kritis, serta mengambil keputusan politik secara rasional. Adanya peningkatan akses terhadap pendidikan formal dalam beberapa tahun terakhir di Kecamatan Slogohimo mulai menunjukkan pengaruh terhadap pengetahuan dan sikap politik masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Mereka yang memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas cenderung lebih aktif mengikuti informasi politik, baik melalui media massa maupun media sosial. Pendidikan juga membentuk pola berpikir yang lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan politik serta mendorong keberanian dalam menyampaikan aspirasi secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berperan dalam

meningkatkan pengetahuan politik tetapi juga membentuk sikap dan nilai-nilai demokratis yang menjadi landasan dari budaya politik partisipatif. Pendidikan menjadi salah satu pendorong penting dalam proses transisi masyarakat dari budaya politik yang bersifat pasif menuju budaya politik yang lebih aktif dan sadar akan hak serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Selain faktor pendorong budaya politik, peneliti juga menemukan faktor penghambat budaya politik, yaitu:

- a. Loyalitas politik tradisional yang kaku. Salah satu ciri budaya politik yang masih mengakar di kalangan generasi tua masyarakat Kecamatan Slogohimo adalah loyalitas politik yang bersifat turun-temurun. Pemilihan partai atau calon tidak lagi berdasarkan pertimbangan rasional terhadap visi, misi, atau kinerja, melainkan lebih pada tradisi dan warisan politik keluarga. Sikap seperti ini sering kali menghambat munculnya kompetisi politik yang sehat karena pilihan politik cenderung statis dan sulit berubah, sekalipun terdapat alternatif calon yang lebih kompeten.
- b. Rendahnya partisipasi dalam aspek *input* politik. Masyarakat Kecamatan Slogohimo cenderung belum terbiasa menyampaikan aspirasi politik secara langsung kepada pemangku kebijakan. Masukan terhadap program atau kebijakan publik lebih sering menjadi topik pembicaraan informal di lingkungan warga, seperti saat berkumpul atau menghadiri kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan rendahnya orientasi masyarakat terhadap aspek *input* politik. Sikap pasif ini umumnya lahir dari pengalaman buruk di masa lalu, di

mana aspirasi yang telah disampaikan tidak mendapatkan tanggapan atau realisasi yang nyata, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap saluran partisipasi formal.

- c. Sikap apatis generasi muda. Generasi muda memiliki akses luas terhadap informasi politik namun tidak semua menunjukkan minat terhadap isu-isu politik. Hal ini disebabkan adanya rasa ketidakpercayaan generasi muda terhadap pemerintah karena banjir informasi yang mereka dapatkan dari media digital cenderung mengarah pada berita-berita negatif terkait isu politik. Mereka menganggap diskusi politik di lingkungan pergaulannya cenderung rumit, melelahkan, dan lebih baik bersikap apatis saja. Sikap ini mencerminkan rendahnya literasi politik dan minimnya ruang edukasi politik yang bisa mengubah persepsi tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Karakteristik budaya politik masyarakat Kecamatan Slogohimo cenderung ke arah tipe budaya politik campuran parokial-kaula. Hal ini dibuktikan adanya sebagian masyarakat yang memiliki orientasi kognitif atau pengetahuannya terhadap sistem politik rendah dan partisipasinya rendah dalam hal *input*. Sedangkan sebagian masyarakat yang lain memiliki minat perhatian atau kesadaran terhadap sistem politik. Orientasi afektif mereka yang nyata berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap tidak percaya terhadap sistem, terutama *output*-nya menunjukkan bahwa posisi sebagian masyarakat adalah pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya memengaruhi atau mengubah sistem sehingga cenderung menerima kebijakan

pemerintah tanpa banyak usaha memengaruhinya.

Faktor-faktor yang mendorong budaya politik masyarakat Kecamatan Slogohimo adalah perkembangan teknologi dan akses media informasi, adanya semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang masih kuat, serta tingkat pendidikan. Sedangkan faktor yang menghambat budaya politik adalah loyalitas politik tradisional yang kaku, rendahnya partisipasi dalam aspek *input* politik, dan sikap apatis politik di kalangan generasi muda.

Saran

Berdasarkan kajian literatur, peneliti menyarankan kepada pemerintah Kecamatan Slogohimo untuk berkolaborasi dengan masyarakat secara aktif dalam upaya untuk meningkatkan pendidikan politik dan sosialisasi bagi masyarakat dalam rangka mendorong budaya politik yang lebih partisipatif. Strategi yang diperlukan yaitu melalui media digital dan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai kearifan lokal masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan agar masyarakat merasa suaranya berharga dan didengar oleh pemerintah. Publikasi informasi melalui media sosial, terbuka menerima saran melalui pertemuan atau rapat di tingkat desa, aktif sosialisasi dengan terjun langsung ke masyarakat, dan memberikan akses seluas-luasnya kepada setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan. Hal ini akan mendorong masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa dan kecamatan.

Daftar Pustaka

Abdulkarim, A., & Ratmaningsih, N. (2012). *Budaya Politik, Partisipasi Politik dan Demokrasi Sebagai Sistem Sosial Politik Indonesia*. Diambil kembali dari

<https://repository.ut.ac.id/4074/1/PKNI44-22-M1.pdf>

Asegaf, S. (2024, Desember 4). *RRI.co.id - Partisipasi Pemilih Pilkada Wonogiri Gagal Capai Target*. Diambil kembali dari

<https://rri.co.id/daerah/1169438/partisipasi-pemilih-pilkada-wonogiri-gagal-capai-target>

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Egeten, M. (2015). Implementasi Budaya Politik Serta Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Politik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(028), 1–12.

Erviantono, T. (2017). Budaya Politik, Uang, dan Pilkada. *Jurnal Transformative*, 3(2), 60–68.

Gabriela, M. (2024, Desember 9). *Partisipasi Pilkada 2024 Berkurang: Evaluasi Sistem Pilkada 2024 Serentak Dibutuhkan | tempo.co*. Diambil kembali dari <https://www.tempo.co/pemilu/partisipasi-pilkada-2024-berkurang-evaluasi-sistem-pilkada-2024-serentak-dibutuhkan--1179019>

Kantaprawira, R. (2006). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Kartiwa, A. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Mustanir, A., & Jaya, I. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(1), 84–97.

Komisi Pemilihan Umum. (2025, Februari 10). *KPU Luncurkan Indeks Partisipasi Pemilu 2024 - KPU*. Diambil kembali dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12788/kpu-luncurkan-indeks-partisipasi-pemilu-2024>

Luhung, I. A. (2024, Maret 27). *Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 di Kabupaten Wonogiri Memuaskan, Tembus 77,14*

- Persen - Radar Solo - Halaman 2*. Diambil kembali dari <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/844486984/partisipasi-pemilih-pemilu-2024-di-kabupaten-wonogiri-memuaskan-tembus-7714-persen?page=2>
- Prayogo, D. V., & Wardhani, N. W. (2022). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat (Studi Kasus Kesbangpol Kota Semarang). *Unnes Political Science Journal*, 6(1), 25–30.
- Pureklolon, T. T. (2021). Eksistensi Budaya Politik di Indonesia: Sebuah Kajian. *Jurnal Communitarian*, 3(1), 405–430.
- Rasaili, W. (2016). Budaya Politik dan Kualitas Demokrasi dalam Pilkada 2015-2020 (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pertama di Indonesia). *Aristo*, 4(2), 1–13.
- Saleh, K., & Munif, A. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik dalam Berdemokrasi. *Addin*, 9(2), 309–332.
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif Terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 24–40.
- Saputro, I. H. (2016). Modernisasi Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo). *Jurnal Politika*, 7(2), 5–20.
- Setiyono, B. (2019). Konsepsi dan Perbandingan Politik. Dalam *core.ac.uk*. Eprints UNDIP. Diambil kembali dari <https://core.ac.uk/download/pdf/228071652.pdf>
- Sumartono. (2018). Budaya Politik dalam Masyarakat Pragmatis. *Jurnal Lugas*, 20(1), 20–26.
- Suryana, Y. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian*, 29(1), 13–28.
- Yusuf, I. M. (2015). Budaya Politik Lokal Dalam Proses Legislatif di Daerah. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(4), 667–676.
- Wangi, P. A. (2023). *Budaya Politik Masyarakat Kota Jambi dalam Pemilihan Presiden 2019 (Studi Kasus : Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT. 13)*. Universitas Jambi.